

Jurnal Riset Akuntansi dan Perbankan
Volume 15 Nomor 2, Agustus 2021 Hal 517-535
ISSN 2088-5008
E-ISSN 2722-4104

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SISTEM ADMINISTRASI
PERPAJAKAN MODERN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR
(Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kota Cimahi)**

Fillanty Indah Sukma¹

fillantyindah_17p069@ak.unjani.ac.id

Anissa Yuniar Larasati²

Anissa.yuniar@lecture.unjani.ac.id

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Jenderal Achmad Yani

ABSTRACT

Motor vehicle tax compliance is one of the problems in the field of taxation. Therefore, the West Java Provincial Revenue Agency, the Samsat Development Team, and related agencies are trying to overcome this problem by carrying out various kinds of tax payment innovations. This study aims to determine the effect of taxpayer awareness and modern tax administration system on motor vehicle taxpayer compliance in Cimahi City. The type of research used is quantitative. The number of samples in this study were 100 respondents consisting of 79 taxpayers who own motorized vehicles registered at the Cimahi City SAMSAT Office and 21 employees at the Cimahi City SAMSAT Office. Data was collected using a questionnaire and processed using SPSS 25. The results in this study indicate that partially taxpayer awareness has a positive effect on motor vehicle taxpayer compliance, and modern tax administration systems partially have a positive effect on motor vehicle taxpayer compliance. Simultaneously, the taxpayer awareness variable and the modern tax administration system affect the compliance of motorized vehicle taxpayers.

Keywords: *Taxpayer Awareness, Modern Tax Administration System, Taxpayer Compliance*

PENDAHULUAN

Penerimaan pendapatan negara merupakan pemasukan yang diperoleh negara untuk membiayai dan menjalankan berbagai program-program pemerintahan, sumber penerimaan tersebut berasal dari berbagai sektor, salah satunya yaitu pajak yang memiliki kontribusi cukup tinggi. Penerimaan pendapatan dari sektor pajak dipengaruhi oleh perkembangan dan pertumbuhan sosial ekonomi suatu negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional dan meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah harus berupaya dalam mengoptimalkan penerimaan pajaknya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang diperoleh dari pajak dan retribusi daerah sebagai sumber pembiayaan pemerintah daerah untuk kesejahteraan masyarakat (Ilhamsyah dkk., 2016).

Pajak Daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) atau daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk mendanai rumah tangga daerahnya. Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 pasal 2 tentang pajak dan retribusi daerah menyebutkan bahwa jenis pajak daerah khususnya pajak provinsi terdiri dari 5 (lima) jenis pajak yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok. Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Jabar, Daud Achmad yang dikutip dalam Bapenda Jabar (2019) menjelaskan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dinilai dapat menopang pembiayaan pembangunan daerah di Jawa Barat karena memiliki kontribusi terbesar dalam peningkatan pendapatan daerah.

Banyaknya jumlah dari wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Cimahi semakin meningkat disebabkan oleh tingginya angka kepemilikan kendaraan bermotor di Kota Cimahi. Maka dari itu berikut disajikan tabel 1.1 mengenai persentase kepatuhan wajib pajak di SAMSAT Kota Cimahi.

Tabel 1. Persentase Kepatuhan Wajib Pajak di SAMSAT Kota Cimahi

Tahun	Jenis Kendaraan		Jumlah Wajib Pajak (Target)	WP PKB yang melakukan pembayaran (Realisasi)	Persentase Kepatuhan Wajib Pajak
	Roda Dua	Roda Empat			
2015	230.172	45.110	275.282	209.378	76%
2016	248.674	48.780	297.454	217.383	73%
2017	266.280	52.898	319.178	225.778	71%
2018	260.741	55.184	315.925	261.315	83%
2019	264.283	56.782	321.065	258.593	81%

Sumber : Kantor SAMSAT Cimahi data sudah diolah.

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dikatakan bahwa pada tahun 2015 tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 76%, sedangkan pada tahun 2016 mengalami penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar 3% dalam melakukan kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor, sehingga hanya sebesar 73%. Pada tahun 2017 mengalami penurunan kembali tingkat kepatuhan sebesar 2%, sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak pada tahun 2017 hanya sebesar 71%. Pada tahun 2018 tingkat kepatuhan wajib pajak mengalami kenaikan sebesar 12% dari tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar 71%, maka tingkat kepatuhan wajib pajak tahun 2018 sebesar 83%. Pada tahun 2019 tingkat kepatuhan wajib pajak terjadi penurunan sebesar 2%, sehingga kepatuhan wajib pajak hanya sebesar 81%.

Menurut Dadi Darmadi Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cimahi berpendapat bahwa pada tahun 2018 ke tahun 2019 pihak SAMSAT kota Cimahi melakukan upaya untuk meningkatkan tingkat kepatuhan bagi wajib pajak kendaraan bermotor, salah satunya melakukan kerjasama dengan orang kecamatan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat

guna memicu timbulnya rasa kesadaran dari wajib pajak dalam membayarkan pajak kendaraan bermotornya. Namun pada Tabel 1.1 terlihat bahwa pada tahun 2018 ke tahun 2019 persentase dari kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan sebesar 2%, walaupun sudah dilakukannya upaya dalam meningkatkan tingkat kepatuhan dari wajib pajak di Kota Cimahi.

Menurut Putra & Merkusiwati (2018) bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain kesadaran wajib pajak dan penerapan sistem administrasi perpajakan modern. Kesadaran wajib pajak tercermin dari kesungguhan maupun keinginan dari wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak, adanya kesadaran dipicu dari pemahaman yang dimiliki wajib pajak tentang fungsi pajak dan kesungguhan dari wajib pajak untuk membayar pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakannya semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Astana & Merkusiwati, 2017).

Tingkat kesadaran dari wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Cimahi belum maksimal, karena jumlah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di SAMSAT Kota Cimahi setiap tahun mengalami peningkatan, akan tetapi jumlah wajib pajak yang sadar untuk memenuhi kewajiban dalam membayar pajaknya menurun. Berdasarkan tabel 1.1 pada tahun 2019 wajib pajak yang terdaftar di SAMSAT Kota Cimahi sebanyak 321.065 akan tetapi jumlah wajib pajak kendaraan bermotor yang melakukan kewajibannya dalam membayar pajak hanya sebanyak 258.593 wajib pajak. Hal ini mencerminkan bahwa masih rendahnya tingkat kesadaran dari wajib pajak, karena terdapat 62.472 wajib pajak kendaraan bermotor yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak.

Pernyataan ini diperkuat oleh Kepala Satuan Tugas Operasi Gabungan SAMSAT Kota Cimahi, Lilis Atia yang dikutip dalam TribunJabar (2018) bahwa para pengendara yang tidak membayar pajak kendaraannya tergolong masih tinggi. Hal ini disebabkan rendahnya kesadaran wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Adapun faktor yang membuat para pengendara tidak membayar pajak kendaraan bermotor karena tidak memiliki waktu untuk datang secara langsung ke SAMSAT, sehingga tidak dapat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotornya.

Selain kesadaran wajib pajak ada pula faktor lain yang mempengaruhi tingkat dari kepatuhan wajib pajak yaitu sistem administrasi perpajakan modern. Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Jawa Barat, Tim Pembina SAMSAT beserta instansi terkait melakukan pembaharuan sistem dan prosedur melalui berbagai macam inovasi layanan baru baik secara tunai maupun non tunai, untuk melakukan pembayaran pajak yang disebut dengan sistem administrasi perpajakan modern. Pembaharuan dari inovasi sistem baru bertujuan untuk meningkatkan kebutuhan dan kepuasan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor, agar proses pembayaran menjadi lebih mudah, cepat dan praktis (Pratiwi & Irawan, 2018).

Berbagai fasilitas disediakan untuk mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak kendaraan bermotor melalui inovasi layanan tunai dan non tunai diantaranya

E-SAMSAT Jabar, SAMSAT J'bret (SAMSAT Jawa Barat Ngabret), SAMSAT Keliling, SAMSAT Outlet, SAMSAT Drive Thru (Bapenda Jabar, 2020).

Sistem administrasi perpajakan modern di Kantor SAMSAT Kota Cimahi menerapkan inovasi layanan yaitu SAMSAT Keliling, SAMSAT Pos, E-SAMSAT, SAMSAT J'bret (SAMSAT Jawa Barat Ngabret) yang diharapkan dapat mempengaruhi kenaikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Cimahi.

Berdasarkan hasil uraian latar belakang dan fenomena yang terjadi, maka memberikan motivasi kepada peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kota Cimahi)”.

Rumusan masalah pada penelitian ialah (1) Bagaimana kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Cimahi.(2) Bagaimana sistem administrasi perpajakan modern kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Cimahi.(3) Bagaimana kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Cimahi dan (4) Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak dan sistem administrasi perpajakan modern secara parsial dan simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Cimahi.

Sedangkan tujuan penelitian ini dijabarkan sebagai berikut (1) untuk mengetahui dan menganalisis kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Cimahi.(2) untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana sistem administrasi perpajakan modern kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Cimahi.(3) untuk mengetahui dan menganalisis kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Cimahi dan (4) untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak dan sistem administrasi perpajakan modern secara parsial dan simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Cimahi.

KERANGKA TEORETIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Menurut Kowel dkk. (2019) Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*) merupakan teori yang menjelaskan mengenai suatu perilaku ditimbulkan oleh individu disebabkan karena adanya niat untuk berperilaku. Niat untuk berperilaku muncul ditentukan oleh tiga faktor yaitu sikap terhadap perilaku (*Behavioral beliefs*), norma subjektif (*Normative beliefs*), persepsi kontrol perilaku (*Control beliefs*).

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimaksud dengan “pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Salah satu jenis dari pajak daerah yang memiliki potensi terbesar bagi penerimaan daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 13 Tahun

2011 tentang Pajak Daerah pasal 1 yang dimaksud dengan “Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.”

Menurut Putra & Merkusiwati (2018) salah satu cara wajib pajak menjadi lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya karena terdapat kesadaran yang timbul dari dalam diri wajib pajak. Menurut Ramdani dkk. (2019) Kesadaran wajib pajak adalah kemauan yang ditimbulkan ketika wajib pajak mengetahui dan mengerti ketentuan perpajakan, sehingga dapat menumbuhkan rasa sukarela dalam menyikapi kewajiban pajaknya. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, maka pemahaman wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya semakin baik. Hal ini dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak (Astana & Merkusiwati, 2017).

Dalam penelitian Ramdani dkk. (2019) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini diperkuat oleh penelitian Wardani & Rumiya (2017) yang menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sejalan dengan penelitian Putra & Merkusiwati (2018) bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Menurut Putra & Merkusiwati (2018) salah satu cara wajib pajak menjadi lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya yaitu melalui sistem administrasi perpajakan modern. Menurut Rahayu (2020:119) Sistem administrasi perpajakan modern merupakan dari bagian reformasi perpajakan yang dibangun secara bertahap dan komprehensif. Adapun pengertian dari Reformasi perpajakan merupakan adanya perubahan sistem perpajakan agar lebih efektif, efisien dan lebih produktif dalam meningkatkan kinerja perpajakan untuk mengoptimalisasi penerimaan pajak (Rahayu, 2020:100).

Menurut Pratiwi & Irawan (2018) Reformasi dan modernisasi perpajakan meliputi aspek teknologi Informasi yang merupakan perangkat lunak, perangkat keras dan sumber daya manusia. Reformasi dari perangkat lunak merupakan perbaikan struktur organisasi, penyempurnaan dan penyederhanaan sistem operasi berupa pembayaran maupun pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi agar menjadi lebih efektif. Sistem administrasi perpajakan menerapkan aspek teknologi informasi sebagai proses pembaharuan pada bidang teknologi informasi.

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) menerapkan sistem administrasi perpajakan modern dengan cara melakukan pembaharuan sistem dan prosedur melalui inovasi teknologi untuk menciptakan berbagai macam sistem layanan yang lebih mudah dan efektif. Penerapan dari sistem administrasi perpajakan yang modern, dilakukan agar dapat mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor yaitu melalui inovasi pelayanan publik (Pratiwi & Irawan, 2018).

Menurut penelitian Virgiawati dkk. (2019) menyimpulkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Perihal tersebut diperkuat oleh hasil penelitian dari (Kowel dkk., 2019) yang menyebutkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal

ini pula didukung oleh penelitian (Pratiwi & Irawan, 2018) yang menyatakan bahwa sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Menurut Pratiwi & Irawan (2018) kepatuhan wajib pajak menjadi faktor utama dalam meningkatnya penerimaan pajak, maka dari itu tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak sangat dibutuhkan agar penerimaan pajak menjadi optimal. Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari bagaimana wajib pajak memenuhi kewajiban serta melaksanakannya dengan tepat dan benar sesuai dengan undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku (Ilhamsyah dkk, 2016).

Berdasarkan landasan teori kerangka pemikiran yang telah diuraikan di atas dan tinjauan dari penelitian sebelumnya, maka hipotesis sebagai berikut :

H₁ :Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

H₂ :Sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

H₃ :Kesadaran wajib pajak dan sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kuantitatif karena data dalam penelitian ini berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan pendekatan penelitian menggunakan metode deskriptif dan asosiatif.

Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan adalah Wajib Pajak Pemilik Kendaraan Bermotor yang terdaftar di Kantor SAMSAT Kota Cimahi. Berdasarkan data yang diperoleh dari SAMSAT Kota Cimahi, jumlah wajib pajak pemilik kendaraan bermotor yang terdaftar pada tahun 2019 sebanyak 321.065 wajib pajak dan jumlah wajib pajak yang menjadi sampel adalah 100 wajib pajak yang terdiri dari 79 wajib pajak pemilik kendaraan bermotor di Kota Cimahi dan 21 pegawai SAMSAT Kota Cimahi.

Metode Sampling

Teknik pengambilan sampel yaitu menggunakan teknik *Probability sampling* dengan menggunakan metode *Simple Random Sampling*. *Simple Random Sampling* adalah teknik penentuan sampel yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi (Sugiyono 2018:82).

Definisi Operasional Variabel

Variabel Independen/Variabel Bebas

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab timbulnya variabel terikat. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu :

1. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah kondisi yang timbul ketika wajib pajak mengetahui dan memahami fungsi pembayaran pajak, sehingga dapat menumbuhkan rasa sukarela pada diri wajib pajak dalam menyikapi kewajiban perpajakannya (Rahayu, 2020:195). Diukur berdasarkan tiga indikator yaitu :

- 1) Kesadaran adanya hak dan kewajiban pajak memenuhi kewajiban membayar pajak
- 2) Kepercayaan masyarakat dalam membayar pajak untuk pembiayaan negara dan daerah
- 3) Dorongan diri sendiri untuk membayar pajak secara sukarela

(Wardani dan Rumiyatun, 2017)

2. Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Sistem administrasi perpajakan modern merupakan suatu proses reformasi perpajakan yang dibangun secara bertahap dan komprehensif, yang meliputi aspek teknologi informasi yaitu perangkat lunak, perangkat keras dan sumber daya manusia (Rahayu, 2020:107). Diukur berdasarkan lima indikator yaitu :

- 1) Kemudahan
- 2) Aksesibilitas
- 3) Efektivitas
- 4) Efisiensi
- 5) Keakuratan Informasi

(Virgiawati dkk., 2019)

Variabel Dependen/Variabel Terikat

Variabel dependen yang diteliti dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Menurut Rahayu (2020:189) Kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undangundang pajak yang berlaku (Ilhamsyah dkk., 2016). Diukur berdasarkan empat indikator yaitu :

- 1) Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan
- 2) Membayar pajak tepat pada waktunya
- 3) Wajib pajak memenuhi persyaratan dalam membayar pajak
- 4) Wajib pajak mengetahui jatuh tempo pembayaran

(Wardani dan Rumiyatun, 2017)

Jenis Data dan Sumber d=Data

Jenis data dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif, jenis data ini berupa angka-angka dan dapat dianalisis menggunakan statistik.Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian atau objek penelitian. Data diambil dengan menyebarkan kuesioner kepada responden. Dalam

penelitian ini, penyebaran kuesioner kepada responden wajib pajak pemilik kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Cimahi diberikan dalam bentuk *google form* dan penyebaran secara langsung dalam bentuk *hard file* kepada pegawai SAMSAT Kota Cimahi.

Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang terdiri dari uji kualitas data dan uji asumsi klasik yang diolah menggunakan Program SPSS Statistic 25.0. Uji kualitas data kuesioner menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda. Adapun tahapan-tahapan dalam analisis meliputi : uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas), analisis regresi linear berganda, analisis koefisien korelasi, uji t, uji F, koefisien Determinasi.

PEMBAHASAN

Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak

Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
1	0,772	0,1966	Valid
2	0,715	0,1966	Valid
3	0,819	0,1966	Valid

Berdasarkan dari tabel 2 di atas dapat disimpulkan bahwa dari 3 item pernyataan yang diuji dan digunakan untuk mengukur kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor dinyatakan valid karena $r_{hitung} > r_{tabel}$.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
1	0,720	0,1966	Valid
2	0,719	0,1966	Valid
3	0,743	0,1966	Valid
4	0,784	0,1966	Valid
5	0,756	0,1966	Valid

Berdasarkan dari tabel 3 di atas dapat disimpulkan bahwa dari 5 item pernyataan yang diuji dan digunakan untuk mengukur sistem administrasi perpajakan modern dinyatakan valid karena $r_{hitung} > r_{tabel}$.

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak

Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
1	0,766	0,1966	Valid
2	0,735	0,1966	Valid
3	0,746	0,1966	Valid
4	0,763	0,1966	Valid

Berdasarkan dari tabel 4 di atas dapat disimpulkan bahwa dari 4 item pernyataan yang diuji dan digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dinyatakan valid karena $r_{hitung} > r_{tabel}$.

Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (X ₁)	0,633	Reliabel
Sistem Administrasi Perpajakan Modern (X ₂)	0,797	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	0,737	Reliabel

Berdasarkan tabel 5 di atas, bahwa Kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai alpha cronbach's $0,633 > 0,6$ sedangkan Sistem Administrasi Perpajakan Modern memiliki nilai *alpha cronbach's* $0,797 > 0,6$ dan Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai alpha cronbach's $0,737 > 0,6$ maka dapat disimpulkan semua pernyataan yang diuji dinyatakan reliabel dan butir pernyataan dapat digunakan sebagai instrumen untuk penelitian karena berdasarkan pengujian reliabilitas semua variabel bebas dan terikat yang diteliti didapat nilai *alpha cronbach's* $> 0,6$.

Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

**Tabel 6. Hasil Uji Normalitas Data
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,88762474
Most Extreme Differences	Absolute	,075
	Positive	,072
	Negative	-,075
Test Statistic		,075
Asymp. Sig. (2-tailed)		,177 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan SPSS 25.0

Berdasarkan dari hasil uji normalitas pada tabel 6 di atas dapat disimpulkan bahwa model regresi ini berdistribusi normal, karena nilai signifikansi yang dihasilkan sebesar 0,177. Nilai dari signifikansi tersebut menunjukkan bahwa angka yang dihasilkan lebih besar dari taraf signifikansi ($\alpha=0,05$).

2. Uji Multikolinearitas

Tabel 7. Hasil Uji Multikolinearitas

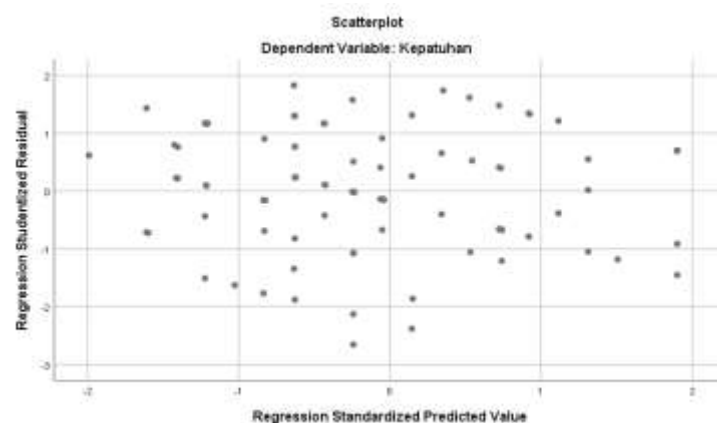
Model	Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
	B	Std. Error	Beta				
1 (Constant)	5,360	1,702		3,150	,002		
Kesadaran	,482	,112	,376	4,300	,000	,938	1,066
Sistem Administrasi Perpajakan Modern	,244	,067	,319	3,645	,000	,938	1,066

a. Dependent Variable: Kepatuhan

Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan SPSS 25.0

Berdasarkan hasil dari uji multikolinearitas pada tabel 7 di atas dapat disimpulkan bahwa nilai tolerance dari variabel independen kesadaran wajib pajak (X1) sebesar 0,938 dan sistem administrasi perpajakan modern (X2) sebesar 0,938, sedangkan nilai VIF kesadaran wajib pajak (X1) yaitu sebesar 1,066 dan sistem administrasi perpajakan modern (X2) adalah sebesar 1,066. Dapat dilihat bahwa semua variabel memiliki nilai *tolerance* lebih dari 0,10 dan untuk nilai VIF kurang dari 10, yang artinya tingkat kolinearitas masih dapat ditoleransi. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kedua variabel independen pada penelitian ini yaitu kesadaran wajib pajak dan sistem administrasi perpajakan modern tidak adanya hubungan atau tidak terjadi multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas



Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan SPSS 25.0

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada gambar di atas menunjukkan bahwa adanya titik-titik menyebar dengan pola yang tidak jelas berada di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu X dan Y. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model ini layak dipakai.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 8. Hasil Uji Regresi Linear Berganda Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5,360	1,702		3,150	,002
Kesadaran	,482	,112	,376	4,300	,000
Sistem Administrasi Perpajakan Modern	,244	,067	,319	3,645	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan

Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan SPSS 25.0

Berikut merupakan persamaan regresi dari hasil uji analisis regresi linear berganda pada tabel di atas adalah :

$$Y = 5,360 + 0,482X_1 + 0,244X_2$$

Adapun penjelasan dari persamaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Dari persamaan di atas menjelaskan bahwa constant sebesar 5,360 yang menunjukkan bahwa jika kesadaran wajib pajak dan sistem administrasi perpajakan modern bernilai 0, maka kepatuhan wajib pajak bernilai sebesar 5,360.
2. Nilai koefisien regresi dari variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0,482 dan bertanda positif yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak mempunyai hubungan yang searah dengan kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti jika variabel kesadaran wajib pajak ditingkatkan 1% (naik satu-satuan) maka variabel kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,482 dengan asumsi bahwa variabel independen (X) lainnya dari model regresi adalah tetap, yang artinya apabila kesadaran wajib pajak naik maka kepatuhan wajib pajak akan naik.
3. Nilai koefisien regresi dari variabel sistem administrasi perpajakan modern sebesar 0,244 dan bertanda positif yang menunjukkan bahwa sistem administrasi perpajakan modern mempunyai hubungan yang searah dengan kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti jika variabel sistem administrasi perpajakan modern ditingkatkan 1% (naik satu-satuan) maka variabel kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,244 dengan asumsi bahwa variabel independen (X) lainnya dari model regresi adalah tetap, yang artinya apabila sistem administrasi perpajakan modern naik maka kepatuhan wajib pajak akan naik.

Hasil Analisis Koefisien Korelasi

Tabel 9. Hasil Uji Korelasi

		Correlations		
		Kesadaran	Sistem Administrasi Perpajakan Modern	Kepatuhan
Kesadaran	Pearson Correlation	1	,249**	,456**
	Sig. (1-tailed)		,006	,000
	N	100	100	100
Sistem Administrasi Perpajakan Modern	Pearson Correlation	,249**	1	,412**
	Sig. (1-tailed)	,006		,000
	N	100	100	100
Kepatuhan	Pearson Correlation	,456**	,412**	1
	Sig. (1-tailed)	,000	,000	
	N	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan SPSS 25.0

Pada tabel hasil uji korelasi pada tabel 9 di atas model regresi koefisien kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak memiliki $r = 0,456$ berarti tingkat hubungan antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak memiliki korelasi sedang karena nilai r berada pada rentang 0,40-0,599. Nilai r dari kesadaran wajib pajak bertanda positif artinya jika kesadaran wajib pajak mengalami kenaikan, maka nilai kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan.

Sedangkan koefisien korelasi sistem administrasi perpajakan modern memiliki nilai $r = 0,412$ menunjukkan bahwa tingkat hubungan antara sistem administrasi perpajakan modern dengan kepatuhan yaitu korelasi sedang karena nilai r berada di rentang 0,40-0,599. Nilai r menunjukkan positif artinya jika sistem administrasi perpajakan modern mengalami kenaikan, maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan.

Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)

Tabel 10. Hasil Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5,360	1,702		3,150	,002
Kesadaran	,482	,112	,376	4,300	,000
Sistem Administrasi Perpajakan Modern	,244	,067	,319	3,645	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan

Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan SPSS 25.0

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 10 adalah sebagai berikut :

1. Nilai t hitung dari variabel kesadaran wajib pajak sebesar $4,300 > 1,984$ dan untuk nilai signifikansinya sebesar $0,000 < 0,05$ yang berarti t hitung $>$ t tabel, maka H_a diterima dan H_o ditolak artinya kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Nilai t hitung dari variabel sistem administrasi perpajakan modern sebesar $3,645 > 1,984$ dan untuk nilai signifikansinya sebesar $0,000 < 0,05$ yang berarti t hitung $>$ t tabel, maka H_a diterima dan H_o ditolak artinya sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji F)

Tabel 11. Uji Statistik F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	153,360	2	76,680	21,086	,000 ^b
Residual	352,750	97	3,637		
Total	506,110	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan

b. Predictors: (Constant), Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kesadaran

Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan SPSS 25.0

Berdasarkan tabel 11 di atas dapat dilihat nilai F hitung sebesar 21,086 sedangkan nilai F tabel sebesar 3,09 maka nilai F hitung $>$ nilai F tabel yaitu sebesar $21,086 > 3,09$. Selain itu, dari tabel hasil uji F dapat dilihat bahwa signifikansi model regresi secara simultan yaitu sebesar 0,000. Nilai ini lebih kecil dari tingkat signifikansi yaitu $0,000 < 0,05$. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa H_o ditolak dan H_a diterima, artinya kesadaran wajib pajak dan sistem administrasi perpajakan modern secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Koefisien Determinasi

Tabel 12. Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,550 ^a	,303	,289	1,907

a. Predictors: (Constant), Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kesadaran

Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan SPSS 25.0

Berdasarkan tabel 12 di atas dan dari perhitungan menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sistem administrasi perpajakan modern memiliki hubungan yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini terlihat dari nilai R 0,550 dengan nilai koefisien determinasinya yaitu R Square sebesar 0,303. Jika dijadikan persentase ($0,303 \times 100\%$) akan diperoleh nilai sebesar 30,3%. Hal ini menunjukkan kesadaran wajib pajak dan sistem administrasi perpajakan modern secara bersama-sama memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 30,3%, sedangkan sisanya 69,7% ($100\% - 30,3\%$) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dilakukan pengamatan oleh peneliti.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kota Cimahi

Berdasarkan tabel 10 dari hasil uji t menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak diperoleh nilai t hitung sebesar $4,300 > 1,984$ dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ yang berarti t hitung $>$ t tabel, sehingga H_a diterima dan H_0 ditolak maka artinya kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain itu apabila dilihat dari hasil koefisien korelasi kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak memiliki nilai $r = 0,456$ yang berarti tingkat hubungan antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak memiliki korelasi sedang karena berada pada rentang 0,40-0,599 dan nilai r juga menunjukkan nilai positif, berarti bahwa setiap kenaikan pada kepatuhan wajib pajak akan disertai kenaikan pada kesadaran wajib pajak.

Penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak para pengendara kendaraan bermotor di Kota Cimahi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Sarifah dkk., (2020) yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, dimana kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor tercermin dari kondisi budaya, sosial dan ekonomi yang dapat membentuk suatu perilaku wajib pajak untuk pengambilan keputusan dalam menyikapi kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak akan muncul apabila terdapat kemauan dari wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya, tanpa ada suatu paksaan dari pihak manapun. Seorang wajib pajak yang membayarkan kewajiban pajaknya didasari atas kemauan pribadi dan disertai dengan pemahaman, maka pemahaman tersebut menjadi salah satu landasan pemikiran bagi wajib pajak bahwa kontribusi dan perannya sangat penting untuk pembiayaan daerah, sehingga untuk memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor tidak menjadi suatu beban bagi wajib pajak.

Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kota Cimahi

Berdasarkan tabel 10 dari hasil uji t menunjukkan bahwa nilai t hitung dari variabel sistem administrasi perpajakan modern sebesar $3,645 > 1,984$ dan untuk nilai signifikansi sebesar $0,000 <$

0,05 yang berarti t hitung $>$ t tabel, maka H_a diterima dan H_o ditolak artinya sistem administrasi perpajakan modern secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain itu apabila dilihat dari hasil koefisien korelasi sistem administrasi perpajakan modern dengan kepatuhan wajib pajak memiliki nilai $r = 0,412$ yang berarti tingkat hubungan antara sistem administrasi perpajakan modern dengan kepatuhan wajib pajak memiliki korelasi sedang karena berada pada rentang 0,40-0,599 dan nilai r juga menunjukkan nilai positif, berarti bahwa setiap kenaikan pada kepatuhan wajib pajak akan disertai kenaikan pada sistem administrasi perpajakan modern.

Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem administrasi perpajakan modern yang diterapkan di SAMSAT Kota Cimahi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan Pratiwi & Irawan (2018) yang menyatakan bahwa adanya pengaruh antara sistem administrasi perpajakan modern dengan kepatuhan wajib pajak. Sistem administrasi perpajakan yang modern menerapkan pembaharuan sistem dan prosedur berupa kemudahan dan penyederhanaan pada proses pembayaran maupun pelayanan pajak kendaraan bermotor dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi, sehingga dapat menjadi lebih efektif dan efisien. Sistem administrasi perpajakan modern dapat memberikan kemudahan dan manfaat bagi wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak. Dengan tersedianya berbagai inovasi layanan SAMSAT baik secara tunai maupun non tunai dapat menjadi pilihan dalam memenuhi kewajiban bagi wajib pajak sesuai dengan kebutuhan, karena pembayaran pajak menjadi fleksibel sejalan dengan aktivitas dari wajib pajak, dapat mempersingkat waktu pelayanan menjadi lebih cepat dan praktis, dan samsat keliling maupun samsat pos berada di lokasi yang cukup strategis yang mudah dijangkau oleh wajib pajak. Hal ini mampu menciptakan wajib pajak yang patuh untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor, karena apabila sistem administrasi perpajakan modernnya terus diperbaharui agar lebih mudah, cepat, dan tepat maka dapat memotivasi wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotornya.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kota Cimahi

Berdasarkan tabel 11 di atas dapat dilihat nilai F hitung sebesar 21,086 sedangkan nilai F tabel sebesar 3,09 maka nilai F hitung $>$ nilai F tabel yaitu sebesar $21,086 > 3,09$. Selain itu, dari tabel hasil uji F dapat dilihat bahwa signifikansi model regresi secara simultan yaitu sebesar 0,000. Nilai ini lebih kecil dari tingkat signifikansi yaitu $0,000 < 0,05$. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa H_o ditolak dan H_a diterima, artinya kesadaran wajib pajak dan sistem administrasi perpajakan modern secara simultan memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dalam hasil analisis uji koefisien determinasi pada tabel 12 menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sistem administrasi perpajakan modern secara bersama-sama memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 30,3%.

Apabila dilihat dari hasil analisis antara koefisien korelasi dan uji t dapat terlihat bahwa variabel kesadaran wajib pajak yang paling mempengaruhi terhadap kepatuhan wajib pajak. karena jika dilihat dari hasil uji t pada tabel 10 menunjukkan nilai t hitung dari kesadaran wajib pajak sebesar 4,300 dimana nilai t hitung ini lebih besar jika dibandingkan dengan nilai t hitung dari sistem administrasi perpajakan modern yang diperoleh hanya sebesar 3,645. Adapun selain itu dilihat pula dari tabel 9 bahwa kesadaran wajib pajak memiliki nilai $r = 0,456$ dimana nilai r ini lebih besar jika dibandingkan dengan nilai r dari sistem administrasi perpajakan modern yang didapat hanya sebesar 0,412. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini variabel independen yang lebih mempengaruhi pada kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak.

Tingkat kepatuhan wajib pajak di SAMSAT Kota Cimahi pada tahun 2020 mengalami peningkatan. Berdasarkan informasi yang diperoleh, adanya peningkatan dari tingkat kepatuhan disebabkan karena pemerintah provinsi Jawa Barat memberikan insentif bagi wajib pajak kendaraan bermotor berupa pengurangan atau pembebasan pajak daerah melalui program *Triple* Untung Plus pada tahun 2020 di masa pandemi *Covid*. Adapun program dari *Triple* Untung Plus yaitu memberikan diskon pajak kendaraan bermotor bagi wajib pajak yang membayar pajaknya lebih awal atau sebelum tanggal jatuh tempo. Selain adanya insentif yang diberikan kepada wajib pajak, adanya kemudahan cara pembayaran pajak kendaraan bermotor seperti e-samsat dan samsat *j'bret* pun dianggap mampu untuk meningkatkan kebutuhan serta kepuasan wajib pajak dalam membayar pajak, maka kepatuhan wajib pajak di SAMSAT Kota Cimahi pada tahun 2020 memiliki kepatuhan yang sangat baik.

KESIMPULAN

1. Kesadaran wajib pajak di SAMSAT Kota Cimahi berdasarkan hasil tanggapan dari responden, mayoritas responden menyatakan setuju mengenai pernyataan terkait kesadaran wajib pajak. Berdasarkan hasil dari analisis, kesadaran wajib pajak menunjukkan kriteria sangat baik. Hal tersebut karena wajib pajak telah mengerti dan memahami tujuan dari pembayaran pajak, sehingga wajib pajak taat dalam memenuhi kewajibannya yang dilandasi dengan adanya kemauan secara sukarela tanpa adanya paksaan untuk bayar pajak kendaraan bermotor. Semakin meningkatnya kemauan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya, maka akan meningkat pula kepatuhannya.
2. Sistem administrasi perpajakan modern di SAMSAT Kota Cimahi berdasarkan hasil anggapan dari responden, mayoritas menyatakan setuju mengenai pernyataan terkait penerapan sistem administrasi perpajakan modern di SAMSAT Kota Cimahi. Berdasarkan hasil dari analisis, sistem administrasi perpajakan modern menunjukkan kriteria sangat baik. Hal tersebut karena sebagian besar wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Cimahi telah mengetahui berbagai macam inovasi layanan baik secara tunai maupun non tunai yang diterapkan di SAMSAT Kota Cimahi, inovasi layanan pembayaran pajak secara modern juga dapat mempermudah wajib pajak

dan dapat mempersingkat waktu pelayanan dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak kendaraan bermotor.

3. Kepatuhan di SAMSAT Kota Cimahi berdasarkan hasil tanggapan dari responden, mayoritas menyatakan setuju mengenai pernyataan terkait kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil dari analisis, kepatuhan wajib pajak menunjukkan kriteria sangat baik. Hal tersebut karena wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Cimahi telah memahami peraturan perpajakan, mematuhi serta mentaati semua prosedur sesuai dengan ketentuan, yang menjadikan wajib pajak semakin sadar dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak.
4. Kesadaran Wajib Pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kota Cimahi.

Sistem Administrasi Perpajakan Modern secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kota Cimahi.

Kesadaran Wajib Pajak dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kota Cimahi.

SARAN

Berdasarkan dari simpulan yang sudah dikemukakan di atas, maka penulis bermaksud untuk memberikan beberapa saran berkaitan dengan pembahasan dan sebagai bahan masukan yang dapat dipertimbangkan :

1. Bagi pihak instansi hendaknya lebih memperhatikan kembali upaya untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor, dengan melakukan sosialisasi pajak secara rutin, terarah dan merata untuk memberikan dasar pemahaman tentang peraturan perpajakan, fungsi, maupun sanksi kepada wajib pajak sebagai landasan kesadaran dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
2. Bagi pihak instansi hendaknya meningkatkan sosialisasi tentang inovasi layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara online maupun offline yang diterapkan di SAMSAT Kota Cimahi, karena masih ada wajib pajak yang bingung atau belum mengetahui dan memahami tata cara pembayaran non tunai seperti e-samsat dan samsat j'bret. Yang diharapkan dapat mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor
3. Penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya agar menambah variabel independen yang lain, selain kesadaran wajib pajak dan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor untuk mengetahui variabel lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan dari wajib pajak. Untuk peneliti selanjutnya penulis menyarankan agar dapat memperluas penelitian dengan menambahkan jumlah sampel dan memperluas cakupan dari responden, sehingga akan mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik.

DAFTAR REFERENSI

Buku:

- Rahayu, Siti Kurnia. 2020. *Perpajakan Konsep, Sistem dan Implementasi*. Cetakan pertama. Edisi Revisi. Bandung: Rekayasa Sains.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kebijakan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Evaluasi*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal:

- Astana, I. W. S., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2017). *Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Januari, 181, 2302–8556.
- Ilhamsyah, R., Endang, M. G. W., & Dewantara, R. Y. (2016). *Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. Journal of Chemical Information and Modeling, 8, 1–9.
- Kowel, V. A. A., Kalangi, L., & Tangkuman, S. J. (2019). *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Minahasa Selatan*. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 7(3).
- Pratiwi, I., & Irawan, A. (2018). *Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kantor Samsat Cimareme)*. Jurnal Polban, 10(1), 1069–1081.
- Putra, I. G. A. S. M., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). *Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Gianyar*. E-Jurnal Akuntansi, 23, 461.
- Ramdani, R. F., Faridah, E., & Elis Badriah. (2019). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. Akuntapedia, 1(1), 72–95.
- Sarifah, N., Sukidin, & Hartanto, W. (2020). *Pengaruh kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Lima Tahunan (Studi di Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Soebandi Kabupaten Jember)*. 14, 352–356.
- Virgiawati, P. A., Samin., & Kirana, D. J. (2019). *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak Di Samsat Jakarta Selatan)*. Jurnal MONEX, 8(2), 1–15.

Wardani, D. K., & Rumiyaun, R. (2017). *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. Jurnal Akuntansi, 5(1), 15.

Perundang-undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Website :

Bapenda Jabar, 2020, Inovasi Layanan SAMSAT, <https://bapenda.jabarprov.go.id/> [diunduh 15 November 2020]

Direktorat Jenderal Pajak, 2020, Jenis Pajak, www.pajak.go.id [diunduh 15 November 2020]

Bapenda Jabar, 2019, Pemdaprov Jabar Targetkan PKB Naik 63 Persen pada 2020, <http://bappeda.jabarprov.go.id/pemdaprov-jabar-targetkan-pkb-naik-63-persen-pada-2020/> [diunduh 15 November 2020]

TribunJabar, 2018, Kesadaran masyarakat Cimahi untuk bayar pajak kendaraan masih rendah, <https://jabar.tribunnews.com/2018/04/18/kesadaran-masyarakat-cimahi-untuk-bayar-pajak-kendaraan-masih-rendah> [diunduh 16 November 2020]